

AHMAT ADAM

Pendidikan Sejarah di Malaysia Dewasa ini: Sejauh Manakah ia Relevan kepada Pembinaan Nasion?

IKHTISAR: Pendidikan sejarah, bagi negara multi-etnik dan multi-bahasa seperti di Malaysia, memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena ia bisa dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan semangat “esprit de corp” atau rasa persatuan antara sesama warga negara. Sementara itu, pendidikan sejarah di Malaysia menempuh era baru apabila mata pelajaran sejarah dijadikan subjek wajib lulus oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk ujian SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) menjelang akhir tahun 2013. Tetapi untuk pelaksanaan yang bijak, rencana pengajaran sejarah di sekolah-sekolah harus membereskan beberapa masalah, seperti perancangan kurikulum yang semrawut, isi silabus dan materi buku pelajaran yang tidak seimbang, serta pendekatan yang membawa persepsi bahwa sejarah Malaysia tidak inklusif untuk semua suku. Ikut dibicarakan adalah langkah-langkah yang harus diambil agar pengajaran sejarah di sekolah berdasarkan prinsip dan metode sejarah yang menekankan objektivitas dan pencarian kebenaran. Makalah berikut ini membicarakan isu-isu pengajaran sejarah di sekolah-sekolah dan coba membahas persoalan-persoalan pendidikan sejarah serta memberikan saran-saran untuk mencari jalan keluar dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah tersebut demi peningkatan kualitas pengajaran dan penelitian sejarah.

KATA KUNCI: Pendidikan sejarah, negara-bangsa Malaysia, guru, siswa, dan kurikulum, serta objektivitas dalam sejarah.

ABSTRACT: This article entitled “History Education in Malaysia Today: Which Far it Relevant to Development of the Nation?”. History education, for a multi-ethnic and multi-language country such as in Malaysia, require special attention from the government because it can be used as a means to instill the spirit of “esprit de corp” or a sense of unity among the citizens. Beside, education in Malaysia has now reached a new turn when passing the history subject is made compulsory for all secondary school students sitting for the School Certificate Examinations. This requirement which was first implemented for candidates who sat for the said examinations towards the end of 2013, however, means that a review of the history curriculum and syllabus is needed in order to ensure that the bureaucrats involved in the drafting of a new curriculum and syllabus understand the proper notion of the historical method and the correct understanding of historical concepts such as objectivity and the search for truth. Also needed is the conscious effort at ensuring the writing of school textbooks are free from bias and ideological propaganda in order to demonstrate inclusiveness for all Malaysians. The following article attempts to demonstrate the weaknesses inherent in the present state of affairs in regard to history teaching in secondary schools and to propose certain steps in order to promote a better understanding of the concept of historical inquiry and enhance the quality of history teaching in schools.

KEY WORD: History education, nation-state of Malaysia, teachers, students, and curriculum, and objectivity in history.

PENDAHULUAN

Tema yang berjudul “pelestarian pemikiran dalam pendidikan sejarah” yang diusung dalam seminar ini

sangat menarik, tetapi ia seolah-olah satu anomali karena tujuan untuk melestarikan pengajaran sejarah telah juga diumumkan oleh Wakil Perdana

Profesor Emeritus Dr. Ahmat Adam ialah seorang ilmuwan dan sejarawan independen dari Malaysia, yang pakar tentang sejarah pers di Indonesia. Banyak melakukan penelitian dan menulis buku, diantaranya adalah *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan* (Jakarta: Penerbit Hasta Mitra, 2003). Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat emel: ahmatadam41@gmail.com

Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin, sejak tanggal 23 Oktober 2010 yang lalu (dalam Abdullah Sani, 2010).

Rakyat Malaysia juga sudah maklum bahwa mata pelajaran Sejarah memang menjadi subjek wajib lulus dalam ujian SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) mulai akhir tahun 2013.

Betapapun demikian, saya kira, diskusi dan pertukaran pikiran yang dihasilkan oleh seminar ini tentu saja akan menjadi menarik lantaran usaha Kementerian Pendidikan Malaysia itu sesungguhnya dianggap bermakna, mengingat ilmu sejarah memang sangat penting bagi membantu proses pembinaan negara berbangsa tunggal (*nation-state*). Malahan pada tahun 2012, di Inggris (*United Kingdom*), juga di Parlemen Inggris, turut dibicarakan secara serius dan banyak orang yang mendukung agar mata pelajaran sejarah wajib diajarkan di semua sekolah di Inggris (*Britain*).

Barangkali tidak banyak orang yang mengetahui bahwa sejarah sebagai satu mata pelajaran hanya diperkenalkan kepada masyarakat umum di Tanah Melayu,¹ untuk pertama kalinya pada tahun 1918, ketika ia dimasukkan sebagai satu mata kuliah dalam program latihan guru oleh R.O. Winstedt, setelah beliau dilantik dan menjabat sebagai Asisten Direktur Pendidikan di Negeri-negeri Selat (*Straits Settlements*) dan Negeri-negeri Melayu Bersekutu (*Federated Malay States*) pada tahun 1916.

Buku-buku pelajaran yang digunakan, antara lain, adalah *Sulalatu's-Salatin (Sejarah Melayu)*, *Hikayat Hang Tuah*, dan *Hikayat Abdullah*. Pada tahun 1918, R.O. Winstedt juga, bersama-sama dengan Daeng Abdul Hamid bin Tengku Muhammad Salleh, telah menghasilkan buku sejarah yang pertama dalam bahasa Melayu, dan diberi judul *Kitab*

Tawarikh Melayu. Buku ini juga, kemudian, menjadi buku pelajaran untuk *maktab* (lembaga atau sekolah) keguruan.

Menurut Za'aba (Zainal Abidin bin Ahmad), seorang pemikir, ahli bahasa, dan pengarang terkenal pada zaman sebelum Perang Dunia II (1939-1945), inilah karya sejarah orang Melayu yang pertama, dengan menggunakan istilah dan konsep sejarah yang benar, yang berbeda dari legenda. Pada tahun 1922, ketika lembaga keguruan di Melaka dan Matang, Perak, digabungkan menjadi SITC (*Sultan Idris Training College*), mata pelajaran sejarah tetap menjadi salah satu subjek yang diprioritaskan.

Pada tahun 1925, salah seorang tamatan perguruan SITC, yaitu *Cikgu*² Abdul Hadi bin Haji Hasan, yang berasal dari Melaka, telah menghasilkan buku yang berjudul *Sejarah Alam Melayu*, yang segera menjadi buku pelajaran utama untuk pendidikan sejarah pada masa itu. Buku ini paling terkenal pada zaman sebelum Perang Dunia II karena waktu jilid pertamanya mula-mula terbit dalam tahun 1925 di Singapura, sambutan dari kalangan mereka yang belajar di sekolah Melayu, terutamanya guru-guru dan para siswa yang mengikuti latihan keguruan sekolah Melayu, sangatlah antusias atau memberangsangkan.

Bahkan, guru-guru yang dilatih di Institut Keguruan Sultan Idris di Tanjong Malim, Perak, Malaysia pada zaman sebelum Perang dan tahun-tahun setelah berakhirnya Perang Dunia II, menganggap *Cikgu* Abdul Hadi bin Haji Hasan lah sejarawan yang telah berjasa dari segi menggerakkan perasaan kebangsaan Melayu melalui karyanya yang sempat diterbitkan dalam tiga jilid. Barangkali efek yang ditimbulkan oleh karya *Cikgu* Abdul Hadi bin Haji Hasan inilah yang telah memberi dorongan pula kepada *Cikgu* Buyong Adil untuk

¹Sebelum tahun 1963, sebutan untuk Malaysia adalah Semenanjung Tanah Melayu atau Malaya.

²*Cikgu* adalah sebutan atau gelar untuk guru sekolah di Malaysia; sama dengan *Pak Guru* atau *Bu Guru* kalau di Indonesia.

menulis jilid keempat dan kelima *Sejarah Alam Melayu* itu.

SEJARAH SEBAGAI PENGEMBLENG IDENTITAS

Semangat kebangsaan yang ditanamkan dan disemaikan oleh buku-buku zaman sebelum Malaya merdeka (1957) jelas memperlihatkan betapa kesadaran kebangsaan dari golongan intelegensia Melayu itu lahir justru karena mata pelajaran sejarah yang telah membuat mereka mengenali diri dan masyarakatnya. Sesungguhnya, setiap bangsa ataupun individu mempunyai ingatan pengalaman masing-masing. Lewat ingatan sejarah lah bangsa atau individu itu bisa mengenali dirinya dan lingkungan sekitar, dunia yang didiaminya. Hanya setelah mengetahui sejarah lingkungan sekitar dan dunia di sekelilingnya, barulah bangsa atau individu itu dapat mengadaptasikan dirinya dan bertindak dengan bijak agar menjadi mudah dengan kondisi lingkungan di sekitarnya itu.

Sebagai contoh, dalam sebuah masyarakat plural seperti di Malaysia, komunitas NON-PRI (Non-Pribumi atau Non-Bumiputra) akan lebih gampang mengerti dan selanjutnya menyesuaikan diri dengan lingkungan budaya setempat setelah memahami sejarah negara ini. Justru, karena sejarah itu adalah memori atau gumpalan pengalaman masa lalu kepada sesuatu bangsa, maka pengalaman atau memori itu adalah merupakan sejarah yang diwarisi bersama-sama oleh rakyat negara itu. Dengan kata lain, tidak dapat dipungkiri bahawa sejarah adalah peringatan pada pengalaman berkelompok sesuatu bangsa.

Persoalan identitas adalah isu dan masalah besar dalam psikologi pembinaan *nasion* atau negara-bangsa. Justru, sejarah itu penting karena tanpa sejarah yang sah dan benar, maka sebuah bangsa tidak mungkin bisa membangun. Setiap warga *nasion*

Malaysia tentulah diharap dapat memahami realitas dan mengerti hakikat bahwa lantaran proses sejarah negara inilah maka lahirnya bangsa, negara, dan agama yang bersifat pluralistik. Seyogianya juga dipahami, justru karena pengalaman sejarah jugalah, maka sesuatu bangsa itu ingin bertindak atau berbuat sesuatu. Sebagai contoh, negara Malaysia pernah mengalami peristiwa permusuhan antar-ras, khususnya antara orang Melayu dan Cina – bukan saja pada periode setelah berakhirnya Perang Dunia II, setelah tentara Jepang menyerah kalah kepada tentara Sekutu pada 15 Agustus 1945, tetapi juga, yang agak lebih serius lagi, adalah ketika terjadi kerusuhan rasial yang dikenali sebagai “Peristiwa 13 Mei 1969”.

Demi untuk menghindari berulangnya konflik antar suku dan ras inilah maka pengertian budaya inter-etnik itu amat perlu diperkuat dan dilestarikan – dan apalagi wadah yang lebih baik dan ampuh jika bukan lewat pembelajaran Sejarah Tanah Air – yang memang bisa menanamkan semangat saling memahami dan menghormati perbedaan tradisi dalam warisan kebudayaan yang beraneka-ragam.

Dengan mengakui hakikat dan realitas bahwa *nasion* Malaysia adalah bersifat pluralistik, yang memiliki banyak ciri-ciri kepelbagaian (diversitas), maka tidaklah heran jika pihak-pihak yang peduli dan prihatin terhadap kenyamanan dan kesentosaan hidup bernegara dan bermasyarakat di Malaysia ini mengharap bahwa lewat pendidikan sejarahlah dapat dipupuk dan dilestarikan keharmonisan dan kesejahteraan antar-ras dalam *nasion* Malaysia.

Semua pihak yang peduli dan prihatin tentu menyadari bahwa rakyat sebuah negara pluralistik, yang tidak mengetahui sejarahnya, akan melahirkan rasa cemburu, tidak percaya, dan sikap prasangka yang pada akhirnya mempertajam rasa

tidak aman (*insecurity*) yang bisa membawa kepada konflik antar-ras. Gejala ini dapat kita lihat jika kita sering mengikuti ekspresi rasa gelisah, kecewa, dan tidak puas hati dalam media internet yang menjurus kadangkala kepada celaan yang menghina dan menista satu suku atau ras, kendatipun semuanya mengakui bahwa Malaysia adalah negara kesayangan masing-masing.

Berdasarkan ekspresi kecewa, sakit hati, yang berbaur dengan perasaan hasad dan dengki, serta polemik-polemik yang bersifat rasial itu ditonjolkan dewasa ini, baik dalam media cetak seperti surat kabar maupun dalam “dunia maya” seperti media sosial di internet, maka rakyat yang membaca bisa dengan mudah menanggapi betapa rapuhnya dan kurang padunya bangunan (fabrik) masyarakat multi-rasial yang dijalin sejak kemerdekaan ini. Melalui gejala-gejala yang kita saksikan ini dapat ditarik kesimpulan dan dirumuskan bahwa apa yang sedang terjadi dalam negara Malaysia sekarang adalah rakyat pelbagai suku di negara ini sedang menghadapi krisis identitas.

Perselisihan dan perpecahan berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang semakin mengkhawatirkan ini membuat setiap warga Malaysia prihatin dan menyadari bahwa upaya memugar, memupuk, dan melestarikan suatu *sense of identity* nasional, atau *deria* jati diri kebangsaan, tidak bisa dianggap ringan dan perlu disegerakan. Dan ini, tentunya, membawa makna bahwa upaya mendidik rakyat agar memahami Sejarah Tanah Air harus diberi perhatian utama.

Seperti semua orang memaklumi bahwa Malaysia adalah sebuah *nasion* yang masih muda. Sebagai sebuah negara yang sarat dengan sifat-sifat ke-*bhinneka*-an, baik dari segi etnisitas, kebudayaan, agama, bahasa, maupun pengalaman sejarahnya,

maka usaha untuk menelusuri sejarah silam Malaysia lewat pembelajaran, pengajaran, dan penelitian tentulah sangat bermanfaat dan penting bagi mengolah dan mengukuhkan roh kebangsaan *nasion* ini demi untuk menolong proses pembinaannya. Betapa pun demikian, di balik sambutan positif dari kalangan para pendidik dan pengamat sejarah pembinaan *nasion* Malaysia modern, perasaan curiga, kurang percaya, dan sinis juga diekspresikan oleh sebagian masyarakat yang *literate* dan peka sejarah.

Berdasarkan suara-suara yang diungkapkan di dalam media (khususnya media internet di dunia maya), kaum intelegensia yang sadar politik kelihatannya sangat prihatin dan bahkan menaruh keraguan dan kekhawatiran terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kualitas isi, materi, dan pendekatan pengajaran ilmu sejarah di sekolah-sekolah dewasa ini – khususnya dari segi menjadikan sejarah sebagai alat untuk menanamkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi baru Malaysia. Masalah yang muncul adalah apakah sejarah harus menjadi alat propaganda?

SITUASI PENGAJARAN SEJARAH YANG KALUT

Walaupun niat dan tekad pemerintah mungkin benar-benar ingin menjadikan pendidikan sejarah sebagai sarana pembinaan bangsa, tetapi dengan menekankan bahwa misi pengajarannya adalah untuk melahirkan generasi yang patriotik, para sejarawan yang jujur pun rata-rata menganggap bahwa paksaan yang bersifat ideologis adalah bertentangan dengan filsafat ilmu sejarah dan ilmu pendidikan itu sendiri. Keraguan ini semakin kuat dan dipengaruhi oleh fakta bahawa pengajaran sejarah di sekolah dewasa ini adalah dalam keadaan tidak karuan dan penuh dengan kekalutan – sekurang-kurangnya dari segi kerangka konseptualnya.

Situasi kalut dan kacau ini, pada hemat saya, terjadi justru karena betapa kurang dalamnya konsep sejarah itu dimengerti oleh mereka yang menyusun, merangka, dan mendesain kurikulum dan silabus ilmu sejarah itu. Penyediaan buku-buku pelajaran untuk mata pelajaran sejarah ini juga dibatasi dan dikungkung oleh syarat-syarat yang bersifat ideologis dan cara berfikir yang masih kolot, yang jelas terbelenggu oleh kedaifan dan absurditas dalam memahami arti sejarah dan filsafat yang tersirat di dalamnya.

Walaupun ramai yang mengkritik isi, materi, dan orientasi buku-buku pelajaran sejarah yang digunakan di sekolah-sekolah menengah dewasa ini akan menyalahkan para pengarang buku pelajaran tersebut, tetapi kenyataan dan hakikat yang sebenarnya adalah tidak adil menyalahkan para pengarangnya secara total, karena mereka hanyalah menuruti arahan dan mengikuti petunjuk “dasar” (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Biro Buku Pelajaran, yang mewakili bagian kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan penting, sekaligus pernyataan, terkait dengan masalah tersebut.

Pertama, mengapa misi menanamkan patriotisme itu bertentangan dengan filsafat sejarah? Sejarah, menurut definisi asalnya, berarti *inquiry* atau penelitian, siasatan; makna selanjutnya adalah “ilmu pengetahuan yang diperoleh akibat dari hasil *inquiry* itu”. Sejak Herodotus, 484-425 SM (Sebelum Masehi), mula memperkenalkan istilah Yunani, *historia*, lebih dua ribu tahun yang lalu, arti sejarah itu pada akhirnya mencakup ruang ilmu yang mengandung makna riwayat kejadian-kejadian yang memberi kesan dan pengaruh kepada sebagian besar manusia, baik ianya dalam bentuk tertulis maupun yang terekam secara lisan.

Tugas sejarawan adalah untuk menyampaikan dan menginformasikan kisah kejadian-kejadian yang diselidikinya itu. Sejarawan seharusnya memberikan informasi yang akurat mengenai apa yang telah terjadi. Sasaran dan target sejarawan ialah akurasi pada suatu kejadian; dan untuk mencari kebenaran sesuatu peristiwa itu, sejarawan menggunakan metode yang khusus.

Dalam usaha untuk memberikan penjelasan yang akurat, sejarawan akan memanfaatkan narasi yang diberikan oleh orang lain, apakah yang berbentuk lisan oleh saksi mata yang menyaksikan peristiwa itu terjadi atau dokumen kontemporer yang mungkin juga berdasarkan kepada penceritaan secara lisan. Tetapi tidak semestinya semua narasi itu diperlakukan secara objektif, atau tanpa bersikap bias, atau berat sebelah. Justru, adalah tugas utama seorang sejarawan untuk tidak, secara sadar, memberikan gambaran atau deskripsi sesuatu peristiwa itu dengan purbasangka atau kecurigaan.

Menurut pemikir ulung Islam, Ibn Khaldun (1332-1406), pendefinisian atau pentakrifan inti sejarah adalah melibatkan spekulasi dan percobaan mencari kebenaran, menjelaskan secara halus dan tidak ketara tentang sebab-musabab dan asal-usul benda-benda yang telah ada, serta memelihara pengetahuan yang dalam mengenai bagaimana dan mengapa terjadinya sesuatu peristiwa (dalam Rosenthal, 1958, I:6).

Dalam konteks pernyataan Ibn Khaldun tersebut di atas, bisa kita andaikan bahwa jika berlaku sikap tidak jujur terhadap filsafat sejarah oleh sang perancang dan perencana kurikulum, maka kemungkinan besar efeknya ialah sejarah yang diajarkan akan menjadi tidak akurat, tidak dapat menghindarkan diri dari distorsi, dan bahkan lebih menjurus kepada propaganda. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibn Khaldun,

sejarah semestinya berusaha untuk mencari kebenaran. Dan menurut sejarahwan abad ke-14 dan 15 ini lagi, pembengkakan dan penyerongan dalam penafsiran sejarah bisa terjadi lantaran pelibatan orang dalam disiplin keilmuan itu telah diambil-alih oleh mereka yang tidak memiliki otoritas dan kewibawaan dalam ilmu itu (dalam Rosenthal, 1958, I:6-10).

Hal inilah yang dikhawatirkan telah terjadi dalam perencanaan dan perancangan kurikulum mata pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Niat dan tekad untuk menjadikan sejarah sebagai sarana untuk mengindoktrinasi semangat patriotik kepada generasi baru Malaysia telah mengorbankan prinsip ilmu dan filsafat sejarah, mengelakkan ia dari sekedar menjadi alat propaganda. Istilah *propaganda* merujuk kepada ikhtiar untuk menyampaikan informasi atau maklumat dalam bentuk yang bias (serong), yang bersifat mengelirukan, dan digunakan untuk mendukung suatu tujuan politik atau sudut pandangan tertentu.

Kedua, pengajaran sejarah, apanya yang kurang? Pengajaran sejarah yang biasa dan lumrah adalah berdasarkan kepada tiga komponen, yaitu: (1) Naratif yang bersifat kronologis; (2) Kerangka konseptual; dan (3) Strategi berpikir.³

Mengenai komponen “naratif yang bersifat kronologis” ini telah pun diberi penekanan dan keutamaan dalam kurikulum sejarah dewasa ini. Tetapi naratif kronologis seperti yang terdapat sekarang ini tidak digabungkan dengan “kerangka konseptual”, yang

merupakan komponen utama kedua dalam pengajaran sejarah. Mungkin dalam pikiran mereka yang merancang dan menyusun kurikulum sejarah dan mereka yang menentukan apa yang harus terkandung dalam buku pelajaran, menurut mereka, kerangka konseptual itu tidak sepenting naratif kronologis. Mereka tidak sadar bahwa kerangka konseptual itu bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman menyeluruh dengan menunjukkan kepada peserta didik (siswa) beberapa tema yang bisa memperlihatkan faktor-faktor seperti kepelbagaian (diversitas), perubahan, kegiatan ekonomi, teknologi, dan filsafat.⁴

Tanggapan bahawa sejarah Malaysia bisa dimengerti dengan mudah tanpa melihatnya dalam konteks perkembangan peradaban (tamadun) di kepulauan Melayu, misalnya, menyebabkan periode yang membicarakan perkara *polity*⁵ orang Melayu, yang akhirnya membawa kepada perwujudan tata-negara Malaysia modern sekarang ini, hanya dipaparkan secara kronologis. Padahal, konsep-konsep seperti “kerajaan”, “hubungan raja dengan rakyat”, “masyarakat berhierarki”, dan “sistem feodal Melayu” memerlukan penjelasan dan penguraian lebih lanjut. Bahkan, “kuasa raja” itu sendiri pun sangat perlu dijelaskan, termasuk “sistem hamba”, konsep “kerah”, serta konsep “setia” dan “durhaka”, begitu juga dengan “sumber hasil dan ekonomi perdagangan yang melibatkan kerajaan” (Shuhaimi *et al.*, 2010).

Demikian juga ketika para perencana dan perancang kurikulum mengandaikan bahwa “nasionalisme Melayu” itu muncul secara tiba-

³Pembicaraan dan diskusi mengenai tiga komponen utama, yang membentuk apa yang disebut sebagai *body of historical knowledge* untuk pengajaran sejarah, dapat dikunjungi lewat website: www.studentsfriend.com [diakses di Kajang, Malaysia: 12/8/2013], yang diselenggarakan dan dieditori oleh Michael G. Maxwell. Lihat juga, misalnya, artikel yang berjudul “What to Teach: An Overview” dalam www.studentsfriend.com [diakses di Kajang, Malaysia: 12/8/2013]; dan Peter Stearns, “Why Study History?”, tersedia [online] juga dalam www.studentsfriend.com [diakses di Kajang, Malaysia: 12/8/2013].

⁴Lihat, misalnya, artikel “Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan 4 dan 5” dalam [Laman Web Rasmi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia](http://LamanWebRasmiBahagianPembangunanKurikulumKementerianPendidikanMalaysia) [diakses di Kajang, Malaysia: 11/8/2013].

⁵*Polity* adalah tatanan masyarakat atau “pemerintah” sebagai entitas politik.

tiba hanya karena adanya gagasan *Malayan Union* yang diperkenalkan oleh pihak penjajah Inggris, tanpa memperhitungkan persekitaran politik, ekonomi, dan sosial di wilayah-wilayah yang dewasa ini terangkum dalam negara federasi (persekutuan) Malaysia, yang menjadi latar belakang pertumbuhan nasionalisme itu (di samping adanya pengaruh luar), maka ia akan mengabaikan dan menafikan peserta didik (siswa) peluang untuk berpikir secara kritis dengan membuat perbandingan dan mengaplikasikan teori sebab-musabab dalam sejarah.

Justru karena kurang mengerti disiplin ilmu sejarah itu jugalah, barangkali, yang menyebabkan tidak dinyatakan secara eksplisit betapa pertumbuhan “nasionalisme Melayu” itu juga dilatarbelakangi oleh gerakan kesadaran politik orang Cina yang lebih dulu lahir, ketika gerakan *Kuomintang* (1912-1949) dan Partai Komunis Malaya (1930-1989) tampil bersaing dengan sengit pada tahun 1930-an untuk meraih dukungan orang Cina – walaupun kiblat politiknya adalah ke daratan dan tanah besar Cina serta perjuangannya jelas bertentangan dengan kepentingan dan aspirasi orang Melayu.

Juga yang tidak dilihat adalah bahwa pertumbuhan “nasionalisme Melayu” itu sendiri terjadi dalam konteks pengaruh gerakan radikal dari nasionalisme Indonesia dan peranan ide-ide pemikiran dari Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka di Indonesia, yang dikutip oleh Ibrahim Haji Yaacob di Malaysia (Adam, 2013). Dari segi sejarah politik di Tanah Melayu juga, tahun-tahun 1920-an dan 1930-an adalah periode yang memperlihatkan upaya masyarakat Cina untuk mempertahankan kebebasan mereka dalam berpolitik, kendatipun dikekang dan dihalang oleh Inggris, serta upaya mereka untuk menegakkan sistem pendidikan “vernacular” (bersifat kedaerahan berdasarkan etnis) mereka, yang secara

historis menandakan bermulanya permasalahan *nation-building* yang berlaku selepas kemerdekaan negara ini.

Agak kurang juga diberikan perhatian ialah menjawab pertanyaan mengapa kemunculan konsep koalisi politik pertama antar-etnik, yaitu AMCJA-PUTERA (*All Malaya Council of Joint Action – Pusat Tenaga Rakyat*),⁶ yang bersifat anti-kolonial dan melibatkan orang Melayu, Cina, India dan *Serani* (Indo) itu berakhir dengan kegagalan. Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan sejarah pembinaan *nasion* Malaysia itu dipersepsikan oleh sebagian kalangan dan berbagai pihak sebagai sejarah yang kurang bersifat inklusif.⁷

Barangkali, lantaran kurangnya perhatian diberikan kepada komponen “kerangka konseptual” inilah, yang menyebabkan pengajaran sejarah kurang menarik dan para siswa di SMA (Sekolah Menengah Atas)⁸ Tingkatan atau Kelas IV dan V – bahkan di SMA Tingkatan atau Kelas VI pun – sukar memahami Sejarah Tanah Air; dan konsekuensi dari semua ini, menyebabkan siswa tidak dilatih untuk memberi pertimbangan, mengikuti jalan

⁶*All Malaya Council of Joint Action* artinya Dewan Aksi Bersama Seluruh Malaya.

⁷Lihat, misalnya, artikel yang berjudul “Malaysian History Textbooks: Whose History?” dalam dbctan.blogspot.com/2011/01/malaysian-history-textbooks-whose.html, Sabtu, 8 Januari 2011 [diakses di Kajang, Malaysia: 10/8/2013].

⁸SMA di Malaysia berbeda dengan Sekolah Menengah di Indonesia yang, di Indonesia, membagikan pendidikan menengahnya kepada SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas). SMA Tingkatan IV di Malaysia adalah setara dengan Kelas I SMA di Indonesia, atau sekarang Kelas X SMA di Indonesia, mengingat Kelas I dan VI adalah untuk SD (Sekolah Dasar), Kelas VII hingga IX adalah untuk SMP, dan Kelas X hingga XII adalah untuk SMA di Indonesia. Di Malaysia, Sekolah Menengah Rendah dimulai dari Tingkatan I hingga III, dan SMA dimulai dari Tingkatan IV hingga VI. Pada tahapan Tingkatan V, para siswa SMA di Malaysia bisa mengambil ujian SPM (Sijil Pelajaran Malaysia), atau UN (Ujian Nasional) di Indonesia, yang membolehkan seorang siswa memasuki PT (Perguruan Tinggi) di Malaysia. Tetapi setelah Tingkatan V, seorang siswa juga bisa, jika memenuhi syarat-syarat, memilih untuk ke Tingkatan VI Rendah dan kemudian Tingkatan VI Atas, sebelum ke universitas.

pikiran yang tajam, dan menganalisis suatu kejadian dalam sejarah.

Keterampilan berpikir dan menganalisis sebetulnya juga berkaitan erat dengan “strategi berpikir” yang disebut sebagai komponen utama yang ketiga dalam pengajaran sejarah. Strategi berpikir adalah praktek mengaplikasikan pengetahuan sejarah dan juga bertujuan untuk melatih siswa memanfaatkan sumber sejarah dan mengenali proses sejarah, sesuai dengan tujuan membangkitkan minat pada siasatan, penyelidikan, dan penelitian sejarah (*historical inquiry*).

Kemampuan peserta didik (siswa) dalam memahami beberapa konsep yang disebutkan di atas, termasuk konsep “raja konstitusional”, “demokrasi parlementer”, “pemilihan umum”, “hak rakyat dan hak asasi manusia”, serta “globalisasi” merupakan beberapa strategi berfikir yang diharapkan bisa melatih siswa yang belajar sejarah untuk berfikir secara objektif, dengan melihat sesuatu gejala itu bukan dengan pandangan yang sempit, tetapi melihatnya dalam konteks keterkaitan dengan dunia luar dan peradaban bangsa lain (tamadun asing). Pengabaian komponen “strategi berfikir” ini akan menyebabkan salah satu daripada tujuan atau kebaikan belajar sejarah itu tidak tercapai.

Ketiga, sasaran pengajaran sejarah. Sejarah adalah sumber inspirasi bagi manusia dalam melahirkan gagasan, pikiran, atau ide untuk memperbaiki keadaan masa kini dan masa yang akan datang. Peranan sejarah adalah untuk mengeksplorasi, atau menerokai, ranah masa lalu demi mencerahkan pemahaman tentang masa kini dan masa depan. Oleh karena ilmu sejarah itu merupakan memori kolektif bagi sebuah *nasion*, maka amatlah penting pengajarannya menuju kepada tujuan untuk memupuk kesejahteraan *nasion* yang sedang dibina. Demi mencapai sasaran ini, narasi sejarah negara seharusnya

meliputi ranah waktu yang lebih luas, yang dapat menjelaskan asal-usul negara ini dan dapat menjelaskan pula mengapa keadaan semasa demikian bentuk dan rupanya.

Berbicara tentang ranah waktu, atau ruang masa, ia sebenarnya melibatkan soal periodisasi. Dengan mengabaikan jangka waktu sejarah Malaysia yang lebih panjang daripada apa yang ditekankan dalam pengajaran di sekolah, mereka yang sadar dan melek sejarah melihat betapa terpasungnya pandangan sejarah yang tidak logis, yang menganggap “semuanya bermula dengan Melaka”. Apakah ada motif tertentu untuk menyatakan bahawa sejarah *polity* Melayu itu hanya bermula dari zaman kesultanan Melaka Islam, yang hanya berusia sekitar 111 tahun? Pengabaian ranah waktu yang lebih panjang, yang menunjukkan peradaban orang Melayu pernah pada suatu waktu tidak bersendikan Islam, saya pikir, adalah sebuah pembengkokan dan distorsi sejarah.

Juga, usaha untuk menyembunyikan fakta bahawa bangsa Melayu pernah menganut agama Buddha dan agama sinkretik Hindu-Buddha selama hampir seribu tahun sebelum masuknya Islam ke wilayah kepulauan Melayu, dan bahwa sebagian dari *psyche* Melayu itu sebenarnya adalah warisan dari nilai-nilai zaman pra-Islam (seperti yang terjelma dalam konsep “budi”, “seni”, dan “etos” golongan rumpun Melayu), telah menyebabkan masyarakat Malaysia hari ini tidak dapat memahami mengapa nilai Melayu yang diwarnai oleh tiga aliran agama besar dunia (termasuk Islam) sangat berbeda dengan nilai orang Cina yang diwarnai oleh sistem kepercayaan yang berpegang pada Taoisme, pemujaan roh nenek-moyang, dan Konfusianisme.

Usaha menyembunyikan kenyataan bahwa raja yang bergelar Parameswara, ketika membuka Melaka, adalah beragama Buddha yang berbaur Hinduisme sinkretik, dan kegagalan

mengaitkan kemunculan kerajaan Melaka sebagai penerus *polity* Melayu yang telah bermula dengan kerajaan Melayu-Jambi dan kerajaan Sriwijaya di Palembang adalah juga suatu kejanggalan dalam pengajaran sejarah, karena pemutarbalikan atau distorsi yang dilakukan telah memperkosa filsafat sejarah yang coba mencari kebenaran, sekalipun elusif sifatnya.

Oleh yang demikian, sikap memberi fokus yang berlebihan kepada kesultanan Melaka demi menunjukkan “keagungan” kerajaan dan budaya Melayu-Islam sehingga zaman Melaka menjadi seolah-olah titik mulanya orang Melayu berbudaya, atau bertamadun, adalah sebetulnya suatu distorsi sejarah. Orang mungkin berfikir bahwa jika sejarah Sriwijaya itu diberikan ruang yang lebih luas, maka ini akan memperkecil niat dan hasrat untuk memberi fokus kepada negara Malaysia. Tetapi konsep “Malaysia” itu bukanlah lahir secara tiba-tiba. *Polity* Melayu yang terpakai di Melaka itu, seperti yang disebutkan tadi, adalah sebetulnya satu mata rantai dalam sejarah peradaban Melayu yang bermula dengan *polity* kerajaan Melayu-Jambi dan kemudian kerajaan Sriwijaya di Palembang (Wolters, 1970).

Bukti keterkaitan sejarah peradaban kuno yang usianya, menurut sumber arkeologi, bermula pada sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi tentulah tidak wajar dikesampingkan. Kita tahu bahwa sejarah Kedah pada abad ke-7 pun tidak dapat dipisahkan daripada sejarah kerajaan Sriwijaya di Palembang; dan kaitan Tanah Melayu dengan Majapahit di Jawa Timur, yang pernah melebarkan wibawa pengaruhnya di negeri-negeri Melayu seperti Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah, Johor, dan bahkan juga wilayah yang disebut di dalam *Nagarakretagama* seperti Paka, Dungun, Muar, Kelang, Jerai, Langkasuka, dan juga Temasik adalah suatu kenyataan, atau hakikat, sejarah (Slametmulyana, 1979:280, *pupuh* xiv).

Kajian prasasti Trengganu (berangka-tahun 1303) juga menunjukkan betapa banyaknya istilah “Jawa kuno” yang dipakai di dalam teks prasasti itu, yang jelas menunjukkan adanya pengaruh Majapahit (Adam, 2014). Pada zaman berikutnya, yakni pada abad ke-17, negeri Kedah, Perak, Pahang, dan Johor pun pernah diduduki dan dikuasai oleh kerajaan Aceh. Mungkin tidak banyak pula orang yang tahu bahawa gelar “Datuk Maharaja Lela”, yang digunakan di Perak, dan peristiwa golongan pembesar Aceh melantik anak raja Perak dan Pahang menjadi Sultan Aceh adalah sebagian dari sejarah Malaysia.

Saya menyebutkan perkara-perkara di atas justru karena saya ingin menunjukkan bahwa kajian dan pengajaran sejarah Malaysia tidak dapat dipisahkan dari mengkaji pertalian dan keterkaitannya dengan kerajaan-kerajaan di seberang Selat Melaka, terutamanya pulau Sumatera.

Jelaslah sekarang kepada kita bahwa persoalan besar yang dihadapi oleh sejarawan di Malaysia kini adalah masalah “periodisasi” Sejarah Tanah Air. Persoalan ini berkaitan pula dengan kurangnya penelitian tentang sejarah zaman awal negara ini, yang walaupun setidaknya telah dibantu oleh data yang dikemukakan oleh beberapa orang arkeolog, tetapi kurang mendapat dukungan para sejarawan untuk ikut menyumbang dan mencerahkan lagi sejarah awal negara Malaysia melalui penelitian.

Minat untuk menyoroti isi manuskrip lama yang memakai aksara Jawi (Arab) di kalangan sejarawan di Malaysia juga secara relatif agak kurang. Masalah ini berangkali erat kaitannya dengan masalah kurangnya dana untuk para sarjana dalam melakukan penelitian sejarah yang bisa, misalnya, memanfaatkan koleksi manuskrip Jawi di perpustakaan-perpustakaan luar negeri.

Masalah ini pun menjadi bertambah ruwet ketika pengajaran sejarah

dijadikan tujuan untuk propaganda demi menegakkan persepsi sejarah dari orang-orang yang membuat kebijakan dan mereka yang terlibat dalam perancangan kurikulum yang, saya kira, terdiri dari kaum birokrat yang pada hakikatnya bukan sejarawan yang *bona fide* alias bisa dipercaya. Jika penglibatan sepihak ini terus terjadi, tanpa pakar dan sarjana sejarah negara untuk diajak konsultasi, maka berlakulah distorsi atau tindakan memutarbalikkan fakta dan sasaran pendidikan sejarah.

Masalah distorsi sejarah ini tidak lepas dari persoalan ingin menjadikan pengajaran sejarah sebagai sesuatu yang mempunyai arah tujuan yang khusus, seperti untuk menanamkan semangat patriotisme, atau memberi warna citra kebudayaan bangsa Melayu itu, sebagai hanya berdasarkan Islam saja. Seharusnya, yang diutamakan adalah upaya memberikan uraian sejarah secara koheren dengan melihatnya dalam konteks persekitaran, seperti melihat kekuatan-kekuatan luar yang mempengaruhi dan membentuk suatu fenomena sejarah. Pendirian seperti ini dibutuhkan agar warga negara tidak selalu berpandangan jumud dan sempit dalam menginterpretasikan sejarah.

Justru karena itulah, apabila kita membicarakan isu nasionalisme maka perbincangan itu tidak bisa dipisahkan dari melihat konteks zaman dan meletakkannya dalam perspektif sejarah yang lebih luas, yang tentunya memerlukan perhatian bukan saja terhadap orang Melayu dan suku-suku lain di negara ini, tetapi juga yang berupa pengaruh dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar Tanah Air. Oleh karena itulah, pengajaran peradaban-peradaban dunia harus dilihat dalam konteks hubungan dan efeknya kepada pertumbuhan peradaban di Asia Tenggara yang turut memberi pengaruh kepada peradaban dan budaya masyarakat di Malaysia.

Adalah juga suatu kejanggalan apabila buku pelajaran sejarah di SMA (Sekolah Menengah Atas) Malaysia,⁹ Tingkatan IV, tidak memberikan penekanan yang sama berat ketika membicarakan sejarah peradaban-peradaban dunia. Lebih celaka lagi adalah bahwa dengan memasukkan sejarah peradaban-peradaban dunia itu tanpa menimbulkan korelasi dan pengaruh dengan peradaban dan budaya setempat, lantaran ia diberikan secara terpisah-pisah; pengertian sejarah mengenai masyarakat Malaysia juga bisa mengelirukan dan membingungkan siswa.

Walaupun sejarah peradaban Eropah diberikan tempat, tetapi pengajarannya tidak membolehkan siswa menghayatinya lantaran pengintegrasian dengan peradaban dan budaya Asia Tenggara tidak dilakukan. Oleh karena itu, tema-tema penting seperti “Renaissans”, “Reformasi Gereja Protestan”, “Feodalisme Eropah”, “Revolusi Agraria dan Industri di Inggris”, dan juga tema “Revolusi Politik” seperti revolusi Amerika Serikat, Perancis, dan Rusia, serta juga konsep “Kolonialisme” dan beberapa yang lain tidak dapat dijelaskan secara utuh. Bahkan, saya diberitahu oleh guru-guru yang saya wawancarai, bahwa mereka tidak sempat juga menguraikan sejarah peradaban Eropah dengan waktu yang cukup, lantaran silabus untuk SMA Tingkatan IV terlalu luas.

Selain sifat keterasingan bab-bab tentang peradaban itu antara satu sama lain, informasi yang diberikan dalam buku pelajaran sejarah juga kelihatan terlalu rinci, sehingga bahan-bahan yang digarap itu bisa digunakan oleh para mahasiswa di PT (Perguruan Tinggi). Dengan kata lain, materi sejarah yang diberikan itu tidak sepadan dengan tingkat kebutuhan dan kemampuan para siswa di sekolah.

⁹Megenai SMA di Malaysia, yang berbeda dengan SMA di Indonesia, lihat kembali catatan kaki nomor 8 dalam artikel ini.

Barangkali sejarah peradaban kuno itu lebih bermanfaat bagi para siswa jika pendekatannya berdasarkan tema, yang melibatkan juga metode, apa yang disebut dengan menggunakan *conceptual framework* atau kerangka konseptual. Barangkali juga pengajaran sejarah peradaban ini akan menjadi lebih efektif jika susunannya berkisar pada tema yang berasaskan konsep-konsep, seperti “pemerintahan”, “ilmu dan teknologi”, “masyarakat dan kebudayaan”, yang diduga berkemungkinan akan membawa pengaruh yang lebih baik dari segi kemampuan siswa dalam memahami asal-usul, perkembangan, dan pencapaian peradaban-peradaban tersebut.

Juga di peringkat SMA Tingkatan IV dan V, pengajaran sejarah negara akan mudah dihayati atau menjadi lebih menarik bagi para siswa Malaysia jika sifat inklusif semua suku, etnis, atau ras dalam proses pembinaan negara bangsa disisipkan. Tema “sejarah pembangunan ekonomi” yang bisa memperlihatkan partisipasi semua suku, etnis, dan ras, misalnya, adalah sangat penting dalam sejarah negara, tetapi sayangnya tema ini pun sedikit sekali diberikan penekanan, kecuali perkembangan ekonomi negara pada zaman Inggris.

Saran-saran di atas, walau bagaimanapun, hanyalah bersifat spekulatif semata-mata, karena pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, menurut informasi, sedang atau mungkin sudah juga selesai merencanakan kurikulum yang baru untuk pengajaran sejarah di sekolah-sekolah.

SITUASI PENDIDIKAN SEJARAH MASA KINI

Menonjolkan terus-menerus, yang diulangi banyak sekali, dalam naratif sejarah Malaysia, ataupun sejarah Islam, di beberapa tahap pembelajaran di sekolah, dan pengisiannya dalam

buku-buku pelajaran yang sarat dengan fakta tetapi tidak terintegrasi dari segi perkaitan ide antara satu dengan yang lainnya, tentu saja menjadikan pembelajaran sejarah membosankan. Sejarah bukanlah semata-mata penceritaan fakta saja, tetapi, lebih daripada itu, ia juga membutuhkan pemahaman yang analitis dan kritis tentang mengapa peristiwa tertentu terjadi. Namun sayangnya, suasana dan keadaan pendidikan masa kini terlalu menekankan pada ujian (peperiksaan) dan hal ini juga menempatkan peserta didik (siswa) dan pendidik (guru) dalam keadaan terpaksa untuk bergantung sepenuhnya kepada buku pelajaran.

Di kalangan para pendidik (guru-guru), mereka merasa seolah-olah harus membanting tulang dan bekerja keras (berhempas-pulas) untuk melengkapi silabus sehingga sistem pembelajaran yang sangat berorientasikan pada ujian (peperiksaan) ini mengikis kepercayaan guru untuk mendidik para siswa agar bisa menghayati Sejarah Tanah Air. Justru karena tidak adanya keseimbangan, baik dari segi isi dan materi buku pelajaran maupun pengintegrasian penjelasan, maka timbul suara-suara yang kini tampaknya semakin lantang menentang beberapa aspek pengajaran sejarah, sehingga hal ini dipersepsikan oleh sebagian golongan dalam masyarakat Malaysia sebagai rasial sifatnya.

Berdasarkan observasi dan tinjauan saya di beberapa *Sekolah Kebangsaan* dan *Sekolah Jenis Kebangsaan*,¹⁰ para guru dan siswa merasakan bahwa informasi yang diberikan dalam buku pelajaran adalah krusial untuk lulus ujian. Justru itu, sikap dan pendirian untuk bergantung sepenuhnya pada buku pelajaran adalah penting karena jawaban dalam ujian yang keluar

¹⁰*Sekolah Kebangsaan* di Malaysia adalah sekolah yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar-mengajarnya; sedangkan *Sekolah Jenis Kebangsaan* adalah sekolah yang menggunakan Bahasa Cina (Mandarin) atau Tamil (India) sebagai bahasa pengantarnya.

berasal dari isi buku pelajaran. Walaupun jawaban itu berdasarkan pada fakta sejarah dan argumennya bisa dianggap logis (munasabah), tapi ianya tidak akan diterima oleh penilai ujian (pemeriksa), yang semata-mata hanya berpedoman kepada apa yang terkandung dalam buku pelajaran resmi versi pemerintah saja. Justru karena itulah, guru dan siswa terpaksa bergantung kepada buku pelajaran semata-mata dan kurang berminat untuk membaca lagi untuk mendapatkan pengetahuan tentang sejarah Malaysia dari sumber lain, yang mungkin memberikan interpretasi yang lebih meyakinkan walaupun berbeda dengan isi buku-buku milik pemerintah.

Situasi ini juga memberi isyarat kepada para siswa tentang betapa pentingnya menghafalkan fakta dalam buku pelajaran sejarah. Bagi para siswa dan guru non-Muslim pula, penekanan yang berlebihan kepada sejarah Islam, yang disajikan secara rinci dalam bentuk kronologis tanpa diimbangi dengan kerangka konseptual, juga menyulitkan mereka untuk memahami dan menghayati sejarah peradaban (tamadun) Islam bila dibandingkan dengan peradaban-peradaban lainnya. Penekanan pada susunan fakta yang banyak dan kronologis tentang Islam juga menimbulkan persepsi di kalangan para siswa non-Muslim bahwa terdapat ciri-ciri yang bias dan mencurigakan dalam pengajaran sejarah, karena mereka tidak melihat adanya relevansi dan kegunaan dengan sejarah pembinaan *nasion* Malaysia.

Adakah jalan keluar dari kemelut ini? Jalan keluar kepada masalah pengajaran sejarah nasional di sekolah-sekolah ialah agar para perancang kebijakan dan perencana kurikulum harus kembali kepada premis asal ilmu sejarah, yaitu menelusuri zaman silam yang telah berlalu dengan tekad untuk mencari kebenaran agar mengerti situasi masa kini Malaysia dan menghadapi tantangan di masa depan

(Cannadine, 2013). Pengajaran sejarah yang efektif dan menyeluruh dari segi menanamkan pemahaman mengenai proses pembinaan negara-bangsa (*nation-state*) akan dengan sendirinya menanamkan satu perasaan bersatu (*sense of belonging*) rakyat dari berbagai suku dan keturunan, dan sekaligus menggembeleng rasa cinta kepada Tanah Air tanpa perlu disuguhkan dengan propaganda terang-terangan lantaran ingin menanamkan semangat patriotisme.

Sense of belonging, yang pada gilirannya juga membawa kepada kesetiaan, hanya akan lahir pada diri anak Malaysia apabila generasi yang dididik dan diasuh dengan pengajaran sejarah yang benar dan transparan betul-betul memahami proses pembinaan *nasion* yang dilalui oleh negara. Pengertian yang “benar” ini akan membolehkan dan menjadikan generasi muda itu mampu mengenali diri dan identitas mereka sebagai sebagian daripada *nasion* Malaysia, yang dibentuk melalui proses dengan penuh kepercayaan dan keinsafan.

Untuk melestarikan pengajaran sejarah yang dapat diterima dan disangga dengan kuat oleh semua lapisan masyarakat, perencanaan dan perancangan yang efektif oleh pemerintah dalam memperbaiki prasarana pendidikan sejarah di sekolah perlu juga segera diusahakan. Kekurangan guru-guru yang terlatih dalam disiplin ilmu sejarah hendaklah segera ditangani. Perpustakaan sekolah harus memberi prioritas (tumpuan) kepada usaha memperbanyak koleksi buku-bukunya, termasuk buku-buku dan jurnal-jurnal sejarah, bukan saja yang diterbitkan dalam Bahasa Melayu tetapi juga Bahasa Inggeris. Tindakan ini perlu karena tidak bisa disangkal bahwa peneliti dan penulis sejarah yang menggunakan bahasa Inggeris ternyata telah menghasilkan lebih banyak karya mengenai sejarah Malaysia dan Asia Tenggara.

Field-trips, atau karyawisata, ke tempat-tempat bersejarah, selain museum dan situs warisan budaya, amat perlu dianjurkan dan diadakan. Tetapi ini hanya bisa terwujud jika pemerintah sanggup menambah alokasi anggaran (keuangan) di sekolah-sekolah dan jumlah siswa di dalam sebuah kelas pun tidak terlalu banyak. Juga tidak kurang pentingnya adalah ikhtiar mengurangi obsesi untuk terlalu bergantung kepada buku pelajaran, lantaran isi dan materi kurikulum yang terlalu sarat dan berat.

Pengajaran sejarah di lembaga-lembaga keguruan pun perlu direformasi agar kualitas latihan guru ditingkatkan lagi dengan memberi penekanan kepada penggunaan sumber yang berbagai. Ini berarti bahwa calon guru-guru sejarah hendaklah terdiri dari mereka yang gemar membaca dan memiliki kekuatan daya penelitian sejarah (*historical inquiry*) yang tangguh. Dan yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa penelitian sejarah Malaysia perlu diberi dukungan kuat oleh universitas dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Antara bentuk dukungan itu ialah dengan menyediakan dana yang mencukupi untuk para sarjana dalam menjalankan penelitian. Akhirnya, terkait dengan soal ini ialah bahwa proses pengajaran dan hasil penelitian di PT (Perguruan Tinggi) sudah barang tentu juga diperlukan peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

KESIMPULAN

Pendidikan sejarah, bagi negara multi-etnik dan multi-bahasa seperti di Malaysia, memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena ia bisa dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan semangat *esprit de corp* atau rasa persatuan antara sesama warga negara, justru karena setiap warga akan merasa inklusif dengan pengalaman sejarah yang diwarisi

bersama. Mereka yang merancang kurikulum dan silabus mata pelajaran sejarah harus menyadari bahwa upaya mempelajari sejarah adalah suatu usaha dan percobaan untuk mencari kebenaran.

Disiplin ilmu sejarah berusaha untuk memberikan uraian dan penjelasan yang tak ketara dan nyata tentang sebab-musabab dan asal-usul keadaan dan situasi yang ada. Justru, pengajaran sejarah harus senantiasa peka dan waspada terhadap elemen propaganda yang bersifat ideologis dan harus berusaha menolaknya demi untuk menghindari sikap yang berat sebelah dalam interpretasi sejarah.¹¹

Bibliografi

- Abdullah Sani, Asrul Hadi. (2010). "Muhyiddin Brushes Aside History Textbook Criticisms" dalam www.malaysiakini.com, 16 Desember [diakses di Kajang, Malaysia: 12 Agustus 2013].
- Adam, Ahmat. (2013). *Melayu, Nasionalisme Radikal, dan Pembinaan Bangsa*. Kuala Lumpur: Penerbit UM [Universiti Malaya].
- Adam, Ahmat. (2014). "Membaca Semula Batu Bersurat Terengganu: Satu Tafsiran Epigrafi". *Hasil Penelitian Belum Diterbitkan*. Kajang, Selangor, Malaysia.
- Artikel "Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah Tingkatan 4 dan 5" dalam [Laman Web Rasmi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia](#) [diakses di Kajang, Malaysia: 11 Agustus 2013].

¹¹Makalah ini, sebelum diperbaiki dan diterbitkan dalam bentuknya sekarang, merupakan naskah Pidato Utama saya yang disampaikan dalam Seminar Kebangsaan Pendidikan dan Geografi, yang diselenggarakan oleh Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial UMS (Universitas Malaysia Sabah), di Kota Kinabalu, Malaysia, pada tanggal 29 Agustus 2013. Beberapa perubahan dari segi istilah dan catatan kaki telah dibuat untuk penyesuaian dengan bacaan dalam Bahasa Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Andi Suwirta, Ketua Umum ASPENSI (Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia) dan juga Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung, yang telah ikut menyempurnakan beberapa kalimat dalam makalah ini agar sejalan dengan tata-bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun begitu, semua isi dan interpretasi dalam makalah ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab akademik saya secara pribadi.

AHMAT ADAM,

Pendidikan Sejarah di Malaysia Dewasa ini

- Artikel "Malaysian History Textbooks: Whose History?" dalam dbctan.blogspot.com/2011/01/malaysian-history-textbooks-whose.html, Sabtu, 8 Januari 2011 [diakses di Kajang, Malaysia: 10 Agustus 2013].
- Artikel "What to Teach: An Overview" dalam www.studentsfriend.com [diakses di Kajang, Malaysia: 12 Agustus 2013].
- Cannadine, David. (2013). "The Future of History" dalam *The Times Literary Supplement* [13 March].
- Rosenthal, Franz. (1958). *Ibn Khaldun, the Muqaddimah: An Introduction to History*, Vol.I. London: Routledge & Kegan Paul, terjemahan.
- Shuhaimi, Nik Hassan *et al.* (2010). *Sejarah Tingkatan 4*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Slametmulyana. (1979). *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya*. Jakarta: Penerbit Bhratara.
- Stearns, Peter. (2013). "Why Study History?". Tersedia [online] juga dalam www.studentsfriend.com [diakses di Kajang, Malaysia: 12 Agustus 2013].
- Wolters, O.W. (1970). *The Fall of Srivijaya in Malay History*. Ithaca, New York: Cornell University Press.